

Analisis Pengelolaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Flores Timur (Studi Pada Desa Sagu, Kecamatan Adonara)

Wahdania Mustarif¹⁾, Sri Roekminiati²⁾, Aris Sunarya³⁾
^{1) 2) 3)} Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Dr. Soetomo Surabaya
Email: wmustarif@gmail.com

ABSTRAK

Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) merupakan program bantuan perbaikan rumah yang dilakukan secara swadaya oleh masyarakat penerima bantuan dalam hal ini masyarakat yang berkategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Berdasarkan kriteria yang digunakan oleh Badan Pusat Statistik untuk mengukur kemiskinan, bahwa kondisi rumah yang tidak layak huni merupakan salah satu ciri dari kondisi masyarakat yang miskin. Untuk mengatasi masalah kemiskinan ini pemerintah berupaya untuk mengurangi rumah tidak layak huni yakni melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan Program bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) oleh Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur serta faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan subjek peneliti adalah pihak pengelola program yaitu Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur dan pihak penerima program yaitu Desa Sagu. Data yang diperoleh melalui data primer yaitu wawancara dan data sekunder melalui dokumen. Penelitian ini menggunakan teori pengelolaan menurut George R. Terry. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan program Bantuan Perumahan Swadaya (BSPS) oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur pada Desa Sagu melalui perencanaan proses perencanaan program BSPS ini terlaksana dengan baik. Berdasarkan aspek pengorganisasian, dilihat dari sisi finansialnya sudah baik akan tetapi di sisi prasarananya belum maksimal artinya pendatanganan bahan atau material masih menjadi kendala dalam program tersebut. Pergerakan atau pelaksanaan di Desa Sagu sejauh ini masih pada tahapan pembangunan, dan pengawasan yang diberikan oleh pihak dinas sudah terlaksana dengan baik. Adapun faktor pendukung dalam pengelolaan ini adalah adanya respon pemerintah Desa Sagu serta masyarakat yang baik, sedangkan faktor penghambatnya adalah keterlambatan pendropingan bahan dan kurangnya tenaga kerja, serta cuaca yang kurang mendukung. Saran dari peneliti dalam perencanaan yaitu sebaiknya pihak pengelola program bantuan stimulan perumahan swadaya di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan memperhatikan potensi kegagalan sehingga perlu disiapkan solusi bilamana kegagalan itu terjadi.

Kata Kunci: Analisis Pengelolaan, Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, MBR

Abstract

The Self-Help Housing Stimulus Assistance Program (BSPS) is a housing improvement assistance program carried out independently by the beneficiaries, in this case, Low-Income Communities (MBR). According to the criteria used by the Central Statistics Agency to measure poverty, the condition of uninhabitable housing is one of the characteristics of poor communities. To address the issue of poverty, the government seeks to reduce uninhabitable houses through the Self-Help Housing Stimulus Assistance Program (BSPS). This research aims to understand the management of the Self-Help Housing Stimulus Assistance Program (BSPS) by the Department of Housing, Settlement Areas, and Land Affairs of East Flores Regency, as well as the supporting and inhibiting factors in its management. The study uses a qualitative descriptive method with the subjects being program managers, namely the Department of Housing, Settlement Areas, and Land Affairs of East Flores Regency, and program recipients, specifically the village of Sagu. Data was collected through primary data (interviews) and secondary data (documents). The research is based on the management theory of George R. Terry. The results show that the management of the Self-Help Housing Stimulus Assistance Program (BSPS) by the Department of Housing, Settlement Areas, and Land Affairs of East Flores Regency in Sagu Village has been implemented well in terms of planning. In the aspect of

organization, the financial management is good; however, the infrastructure is not yet optimal, as the delivery of materials remains a challenge for the program. The execution in Sagu Village is still in the construction phase, and supervision by the department has been carried out effectively. The supporting factors in this management include positive responses from the Sagu Village government and the community, while the inhibiting factors are delays in material delivery, a shortage of labor, and unfavorable weather conditions. The researchers suggest that in planning, the program managers at the Department of Housing, Settlement Areas, and Land Affairs should consider potential risks and prepare solutions in case of failures.

Keywords: *Management Analysis, Self-Help Housing Stimulus Assistance Program, MBR*

A. LATAR BELAKANG

Permasalahan sosial di negara berkembang seperti di Indonesia saat ini adalah masalah kemiskinan. Kemiskinan sudah menjadi suatu hal yang tidak bisa dihindari bahkan sudah menjadi masalah yang paling mendasar dan tidak mudah dalam penyelesaiannya. Salah satu masalah dari beberapa masalah sosial yang dialami oleh bangsa Indonesia yaitu banyaknya masyarakat miskin atau masyarakat berpenghasilan rendah yang memiliki rumah tidak layak dihuni, lingkungan tempat tinggal yang kurang baik dan tidak sehat serta ada juga masyarakat yang sudah punya lahan tetapi belum mempunyai rumah (Lestari, 2015).

Masyarakat pada umumnya belum mengenal dengan baik mengenai arti pentingnya kesejahteraan masyarakat dan pemahaman yang jelas mengenai apa itu kesejahteraan masyarakat. Masyarakat cenderung mengartikan kesejahteraan masyarakat semata-mata sebagai kegiatan pemberian bantuan barang dan uang kepada kelompok masyarakat miskin atau rehabilitasi masyarakat yang dilakukan di panti-panti sosial seperti panti jompo, panti asuhan, panti karya wanita dan lain-lain. Padahal esensi pembangunan kesejahteraan sosial adalah sebagai kegiatan “pemberdayaan” masyarakat melalui pemberian modal usaha, penyediaan kredit mikro, pelatihan keterampilan usaha ekonomi produktif dan lain-lain (Rahman, 2018).

Pembangunan sangat penting untuk membentuk dan menghasilkan sumber daya manusia yang produktif. di mana perubahan masyarakat sebagai respons terhadap kemajuan diantisipasi. Pada hakikatnya, terpenuhinya kebutuhan dasar setiap orang adalah pertumbuhan yang dicita-citakan masyarakat.

Namun masyarakat terus hidup dalam keadaan yang merugikan, seperti kemiskinan. Kemiskinan merupakan akibat dari kesenjangan sosial. Seperti yang kita ketahui bahwa masalah kemiskinan itu sendiri ditandai dengan permasalahan-permasalahan sosial lainnya seperti anak terlantar, pengemis, gelandangan, masyarakat yang tidak memiliki rumah yang layak untuk dihuni, tuna susila, pengangguran, kejahatan, tingkat kesehatan rendah, kurangnya pendidikan dan lain-lain. Berbagai permasalahan tersebut terus dialami atau dihadapi oleh masyarakat Indonesia. Hingga saat ini kemiskinan masih menjadi kendala atau kendala dalam mencapai kehidupan yang sejahtera, khususnya bagi masyarakat.

Pada dasarnya, tempat tinggal menempati urutan pertama dalam daftar kebutuhan, setelah sandang dan pangan. Manusia memenuhi kebutuhan dasarnya, atau kebutuhan primer, sebelum beralih ke kebutuhan perantara dan tersier. Selain berfungsi sebagai tempat berlindung dari segala kondisi cuaca dan bencana alam lainnya, rumah juga berfungsi sebagai pusat pendidikan keluarga, pembibitan budaya, dan aset pendidikan generasi penerus masyarakat.

Kemiskinan sendiri merupakan salah satu indikator kondisi sosial dan ekonomi yang digunakan untuk mengevaluasi efektivitas pembangunan pemerintah di suatu daerah. Ketika seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan minimal sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan, maka ia dianggap berada dalam kemiskinan. Permasalahan kemiskinan merupakan salah satu dari sekian banyak permasalahan kemasyarakatan yang dihadapi negara Indonesia saat ini. Memiliki rumah yang tidak layak huni merupakan salah satu ciri orang

miskin, menurut standar pengukuran kemiskinan Badan Pusat Statistik.

Nusa Tenggara Timur menduduki peringkat ke 2 nasional untuk rumah tidak layak huni. Kategori rumah tidak layak huni antara lain tidak memiliki MCK, tidak ada air bersih yang mengalir, tidak ada listrik lantai tanah, berdinding bambu atau pelepah lontar, dan atap alang-alang. BSPS yang mewajibkan rumah tangga sangat miskin, tidak mempunyai lahan, dan rumah tidak layak huni.

Salah satu tujuan akhir dari Program BSPS adalah Untuk memberdayakan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) agar mampu membangun atau meningkatkan kualitas rumah secara swadaya sehingga dapat menghuni rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat dan aman.

Penelitian ini dibuat berdasarkan fenomena bahwa banyak sekali ditemukan permasalahan-permasalahan terkait dari BSPS, dimulai dari bantuan yang diberikan tidak tepat sasaran dan juga masyarakat yang tidak dapat memandirikan diri sendiri. BSPS yang ditujukan untuk masyarakat miskin dan tidak mempunyai lahan ini banyak sekali yang tidak sesuai penempatannya, ada beberapa masyarakat di Desa Sagu yang sebenarnya berkecukupan secara finansial tetapi malah mendapatkan bantuan BSPS.

Pengelolaan terhadap Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya ini dinilai kurang efektif dan berpotensi pada kecemburuan sosial yang kerap terjadi di masyarakat. Hal ini sesuai dengan Pengamatan pendahulu yang dilakukan oleh peneliti yakni menemukan bahwa masyarakat merasa penyaluran tidak berdasarkan pada ketentuan melainkan pemilihan oleh pemerintah desa. Namun ketika dikonfirmasi ke pihak terkait ditemukan bahwa bantuan perumahan ini bersifat swadaya. Sehingga masyarakat juga turut terlibat baik secara tenaga maupun materi. Karena dalam pembangunan bantuan rumah itu sendiri sifatnya gotong royong. Sehingga ketika program ini dijalankan maka salah satu faktor yang dilihat adalah kesiapan masyarakat terkait kemampuannya dalam membangun rumah yang diberikan oleh pemerintah tersebut.

Selain permasalahan tersebut diatas hal-hal yang juga diduga menjadi masalah yang lain adalah transparansi terhadap mekanisme penyaluran dinilai tidak dilakukan secara transparan sehingga salah satu hal yang menjadi konsentrasi peneliti adalah terkait dengan bagaimana pengelolaannya apakah sudah sesuai prosedur yang ada atau justru terkesan acuh dan asal-asalan atau justru masyarakat yang kurang mendapat edukasi terkait dengan program yang bantuan rumah itu sendiri. Selain itu juga persoalan yang dianggap penting ialah faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendukung dalam menyalurkan program bantuan tersebut.

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti mencoba menganalisis tentang program bantuan stimulan perumahan swadaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, yakni Program BSPS yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Flores Timur. Maka dari itu, fokus penelitian ini adalah program bantuan yang diterima apakah tepat dan sesuai kebutuhan untuk memenuhi persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan. Berdasarkan permasalahan yang dipaparkan, sebagian besar perumahan layak huni menjadi sebuah persoalan yang harus diperhatikan secara berkala, karena mempengaruhi kesejahteraan masyarakat sekitar. Dalam hal ini, penulis ingin menganalisis program pemerintah daerah dalam program bantuan stimulan perumahan swadaya di Kabupaten Flores Timur. Untuk itu judul peneliti ini adalah “Analisis Pengelolaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Flores Timur (Studi Pada Desa Sagu, Kecamatan Adonara)”.

B. LANDASAN TEORITIS

1. Pengertian Kebijakan Publik

Seperti yang kita ketahui bahwa lingkup dari studi kebijakan publik sangat luas karena mencakup berbagai bidang dan sektor seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, dan sebagainya. Disamping itu dilihat dari hirarkinya kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional maupun lokal seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Pemerintah

Daerah/Provinsi, Keputusan Gubernur, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, dan Keputusan Bupati/Walikota.

Secara terminologi pengertian kebijakan publik (*public policy*) itu ternyata banyak sekali, tergantung dari sudut mana kita mengartikannya. Easton memberikan definisi kebijakan publik sebagai *the authoritative allocation of values for the whole society* atau sebagai pengalokasian nilai-nilai secara paksa kepada seluruh anggota masyarakat. Laswell dan Kaplan juga mengartikan kebijakan publik sebagai *a projected program of goal, value, and practice* atau sesuatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dalam praktek-praktek yang terarah (Bloom et al., 2013).

Lebih lanjut, Pressman dan Wildavsky sebagaimana dikutip Budi Winarno (2002:17) mendefinisikan Kondisi awal dan hasil yang dapat diprediksi mencirikan kebijakan publik sebagai sebuah hipotesis. Kebijakan publik perlu dibedakan dengan jenis kebijakan lain, misalnya kebijakan swasta. Keterlibatan faktor non-pemerintah berdampak pada hal ini (Approach, 2016). Robert Eyestone sebagaimana dikutip Leo Agustino (2008:6) mendefinisikan kebijakan publik sebagai hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya. Banyak pihak beranggapan bahwa definisi tersebut masih terlalu luas untuk dipahami, karena apa yang dimaksud dengan kebijakan publik dapat mencakup banyak hal.

Kebijakan publik, menurut Nugroho mempunyai dua ciri yaitu (1) merupakan sesuatu yang mudah dipahami karena mengacu pada tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan nasional; dan (2) merupakan sesuatu yang mudah diukur karena ukuran tersebut jelas dan menunjukkan sejauh mana tujuan telah dicapai.

Menurut Woll sebagaimana dikutip Tangkilisan (2003:2), kebijakan publik mengacu pada serangkaian inisiatif pemerintah yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan

kemasyarakatan, baik secara langsung maupun melalui berbagai organisasi yang berdampak pada kehidupan masyarakat.

Selain itu dipertegas juga oleh Thomas R Dye sebagaimana dikutip Islamy (2009:19) mendefinisikan kebijakan publik sebagai *is whatever government choose to do or not to do* (apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan). Definisi ini menekankan bahwa, kebijakan publik lebih dari sekedar deklarasi tujuan pemerintah atau pegawai negeri, ini tentang mewujudkan tindakan. Selain itu, keputusan pemerintah untuk tidak mengambil tindakan juga merupakan kebijakan publik karena mempunyai konsekuensi yang sama dengan keputusan pemerintah untuk mengambil tindakan.

David Easton sebagaimana dikutip Leo Agustino (2009:19) memberikan definisi kebijakan publik sebagai *the authoritative allocation of values for the whole society*. Konsep ini menggarisbawahi bahwa pemerintah merupakan satu-satunya entitas yang memiliki kewenangan hukum dalam sistem politik, dan bahwa keputusan pemerintah untuk bertindak atau tidak bertindak atas nama masyarakat merupakan bentuk pengalokasian nilai. Hal ini disebabkan karena pemerintah termasuk ke dalam *authorities in a political system* yaitu para penguasa dalam sistem politik yang terlibat dalam urusan sistem politik sehari-hari dan mempunyai tanggung jawab dalam suatu masalah tertentu dimana pada suatu titik mereka diminta untuk mengambil keputusan di kemudian hari kelak diterima serta mengikat sebagian besar anggota masyarakat selama waktu tertentu.

Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu guna memecahkan masalah-masalah publik atau demi kepentingan publik. Kebijakan untuk melakukan sesuatu biasanya tertuang dalam ketentuan- ketentuan atau

peraturan perundang-undangan yang dibuat pemerintah sehingga memiliki sifat yang mengikat dan memaksa.

2. Urgensi Kebijakan Publik

Untuk melakukan studi kebijakan publik merupakan studi yang bermaksud untuk menggambarkan, menganalisis, dan menjelaskan secara cermat berbagai sebab dan akibat dari tindakan-tindakan pemerintah. Menurut Thomas R. Dye, sebagaimana dikutip Sholichin Abdul Wahab (Suharno, 2010:14) menjelaskan bahwa studi kebijakan publik terdiri dari rangkuman inisiatif kebijakan publik, mengevaluasi bagaimana faktor lingkungan mempengaruhi substansi kebijakan publik, dan mengkaji bagaimana deklarasi kelembagaan dan prosedur politik yang berbeda mempengaruhi kebijakan publik; studi komprehensif tentang dampak berbagai kebijakan politik terhadap masyarakat, dengan mempertimbangkan dampak yang diharapkan (direncanakan) dan tidak terduga dari kebijakan publik.

Sholichin Abdul Wahab sebagaimana dikutip Suharno (2010: 16-19) dengan mengikuti pendapat dari Anderson (1978) dan Dye (1978) menyebutkan beberapa alasan mengapa kebijakan publik penting atau urgen untuk dipelajari, yaitu:

a) Alasan Ilmiah

Tujuan mempelajari kebijakan publik adalah untuk mempelajari sebanyak mungkin tentang awal mula, evolusi, dan dampak sosialnya. Kebijakan dapat dilihat sebagai variabel independen atau variabel dependen dalam situasi ini. Karena kebijakan publik dipandang sebagai variabel dependen, maka pertimbangan akan diberikan pada elemen politik dan lingkungan yang secara langsung mempengaruhi atau berkontribusi terhadap perumusan kebijakan. Jika penekanannya adalah pada bagaimana kebijakan mempengaruhi sistem politik dan lingkungan yang membentuk kebijakan

publik, maka kebijakan dipandang sebagai variabel independen.

b) Alasan Professional

Tujuan dari studi kebijakan publik adalah untuk menyebarkan informasi di lapangan guna mengatasi masalah-masalah sosial yang umum.

c) Alasan Politik

Mempelajari kebijakan publik pada dasarnya dimaksudkan agar pemerintah dapat menempuh kebijakan yang tepat guna mencapai tujuan yang tepat pula.

3. Tahap-Tahap Kebijakan Publik

Pembuatan kebijakan publik merupakan proses rumit yang memerlukan penelitian ekstensif karena banyaknya proses dan variabel yang terlibat. Akibatnya, sejumlah ilmuwan politik yang mengkhususkan diri pada studi kebijakan publik membagi proses pengembangan kebijakan publik menjadi beberapa fase. Pemisahan semacam ini dimaksudkan untuk memudahkan kajian kita mengenai kebijakan publik. Namun, beberapa ahli mungkin mengatur langkah-langkah ini secara berbeda.

Tahap-tahap kebijakan publik menurut William Dunn sebagaimana dikutip Budi Winarno (2007:32-34) adalah sebagai berikut:

a) Tahap Penyusunan Agenda

Masalah-masalah publik menjadi perhatian para pejabat yang dipilih dan ditunjuk. Sebelumnya, hal ini diperjuangkan terlebih dahulu untuk dimasukkan ke dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, sejumlah topik masuk ke dalam agenda perumus kebijakan. Pada titik ini, satu permasalahan mungkin tidak dibahas sama sekali, sementara permasalahan lainnya diputuskan untuk menjadi topik pembicaraan utama, atau permasalahan mungkin ditunda untuk sementara waktu karena alasan tertentu.

b) Tahap Formulasi Kebijakan

Setelah isu-isu tersebut dimasukkan ke dalam agenda kebijakan, isu-isu tersebut dibahas oleh para pembuat kebijakan. Setelah masalah-masalah tersebut dirumuskan, dicari solusi optimalnya. Persoalan ini dapat diatasi dengan menggunakan berbagai pilihan kebijakan yang ada saat ini. Masing-masing opsi bersaing untuk dipilih sebagai rangkaian tindakan yang digunakan untuk mengatasi permasalahan dalam pembentukan kebijakan. Masing-masing aktor akan bersaing pada tahap ini untuk menawarkan solusi terbaik atas permasalahan tersebut.

c) Tahap Adopsi Kebijakan

Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau putusan pengadilan.

d) Tahap Implementasi Kebijakan

Hanya ketika sebuah inisiatif kebijakan tidak dilaksanakan yaitu ketika inisiatif tersebut tidak dilaksanakan oleh lembaga pemerintah atau badan administratif di tingkat yang lebih rendah, maka inisiatif tersebut akan menjadi catatan elit. Divisi administratif yang telah memberikan dana dan personel melaksanakan kebijakan yang telah diambil. Berbagai kepentingan akan bersaing satu sama lain sepanjang tahap implementasi ini. Para pelaksana kebijakan mungkin mendukung penerapan kebijakan tertentu namun menentang penerapan kebijakan lainnya.

e) Tahap Evaluasi Kebijakan

Pada fase ini, kebijakan-kebijakan yang telah diterapkan akan diperiksa atau dievaluasi untuk menentukan sejauh mana kebijakan-kebijakan tersebut telah memberikan dampak yang diinginkan yaitu untuk mengatasi masalah-masalah sosial. Oleh karena itu, ditetapkanlah

pengukuran atau kriteria yang menjadi landasan untuk menentukan apakah kebijakan publik yang diambil telah memberikan dampak atau tujuan yang diinginkan.

4. Analisis Kebijakan

Menurut William N. Dunn (2000), analisis kebijakan adalah bidang ilmu sosial terapan yang menghasilkan dan menyebarkan informasi yang berkaitan dengan kebijakan sehingga dapat dimanfaatkan secara politik untuk mengatasi permasalahan kebijakan. Hal ini dilakukan dengan menggunakan berbagai teknik penelitian dan pembenaran. Weimer and Vining (1998:1) menjelaskan bahwa *the product of policy analysis is advice. Specifically, it is advice that inform some public policy decision*. Oleh karena itu, analisis kebijakan publik lebih merupakan pedoman atau informasi yang perlu diperhatikan oleh para pengambil kebijakan publik. Hal ini mencakup isu-isu yang diangkat, tugas-tugas yang diperlukan organisasi publik sehubungan dengan isu-isu tersebut, dan potensi pilihan kebijakan beserta evaluasinya masing-masing berdasarkan tujuan kebijakan.

Tujuan dari analisis kebijakan publik adalah untuk memberikan saran guna membantu pengambil keputusan dalam mengatasi permasalahan publik. Analisis kebijakan publik mencakup data mengenai isu-isu yang dihadapi publik serta argumen yang mendukung dan menentang berbagai pilihan kebijakan, yang dapat digunakan oleh pembuat kebijakan sebagai panduan atau inspirasi.

Analisis kebijakan publik berdasarkan kajian kebijakannya dapat dibedakan antara analisis kebijakan sebelum adanya kebijakan publik tertentu dan sesudah adanya kebijakan publik tertentu. Analisis kebijakan sebelum adanya kebijakan publik berpijak pada permasalahan publik semata sehingga hasilnya benar-benar sebuah rekomendasi kebijakan publik yang baru. Keduanya baik analisis kebijakan sebelum

maupun sesudah adanya kebijakan mempunyai tujuan yang sama yakni memberikan rekomendasi kebijakan kepada penentu kebijakan agar didapat kebijakan yang lebih berkualitas.

Dunn (2000:117) membedakan tiga bentuk utama analisis kebijakan publik, yaitu:

a) Analisis Kebijakan Prospektif

Analisis Kebijakan Prospektif yang berupa produksi dan transformasi informasi sebelum aksi kebijakan dimulai dan diimplementasikan. Analisis kebijakan disini merupakan suatu alat untuk mensintesis informasi untuk dipakai dalam merumuskan alternatif dan preferensi kebijakan yang dinyatakan secara komparatif, diramalkan dalam bahasa kuantitatif dan kualitatif sebagai landasan atau penuntun dalam pengambilan keputusan kebijakan.

b) Analisis Kebijakan Retrospektif

Analisis kebijakan retrospektif adalah sebagai penciptaan dan transformasi informasi sesudah aksi kebijakan dilakukan. Terdapat tiga tipe analisis berdasarkan kegiatan yang dikembangkan oleh kelompok analisis ini yakni analisis yang berorientasi pada disiplin, analisis yang berorientasi pada masalah dan analisis yang berorientasi pada aplikasi. Tentu saja ketiga tipe analisis retrospektif ini terdapat kelebihan dan kelemahan.

c) Analisis Kebijakan yang Terintegrasi

Analisis kebijakan yang terintegrasi merupakan bentuk analisis yang mengkombinasikan gaya operasi para praktisi yang menaruh perhatian pada penciptaan dan transformasi informasi sebelum dan sesudah tindakan kebijakan diambil. Analisis kebijakan yang terintegrasi tidak hanya mengharuskan para analis untuk mengaitkan tahap penyelidikan retrospektif dan perspektif, tetapi juga menuntut para analis untuk terus menerus

menghasilkan dan mentransformasikan informasi setiap saat.

5. Pengertian Pengelolaan

Definisi dari pengelolaan dapat disamakan dengan manajemen yang berarti mengatur atau mengurus. Sebagaimana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata pengelolaan memiliki beberapa pengertian diantaranya (1) Proses atau cara mengelola; (2) Proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan orang lain; (3) Proses membantu merumuskan kebijakan dan tujuan organisasi; dan (4) Proses memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan pencapaian tujuan.

Selain itu, pengelolaan juga dapat diartikan sebagai serangkaian usaha yang bertujuan untuk menggali dan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu yang telah direncanakan sebelumnya.

Lebih lanjut, Menurut Nugroho (2003), dalam (Sispa Wendi, 2018:12) pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen. Secara etimologi istilah pengelolaan berasal dari kata kelola (*to manage*) dan yang berarti suatu proses mengurus sesuatu untuk mencapai suatu tujuan. Jadi pengelolaan atau manajemen berhubungan dengan proses mengurus atau menangani sesuatu untuk tujuan tertentu yang hendak dicapai.

Suharsimi Arikunto (1993:31) dalam Siti Hardiyanti Patimah (2012:14) mengatakan bahwa kata pengelolaan dapat juga diartikan dengan manajemen, yang berarti pengaturan atau pengurusan. Tetapi banyak orang yang mengartikan manajemen sebagai suatu pengaturan, pengelolaan, dan pengadministrasian. Pengelolaan diartikan sebagai suatu rangkaian kegiatan atau usaha untuk mencapai tujuan tertentu yang dilakukan oleh sekumpulan orang-orang.

6. Fungsi Dasar Manajemen Pengelolaan

Menurut George R. Terry dalam bukunya *Principles of Management* (Sukarna, 2011:10) membagi empat fungsi dasar manajemen atau pengelolaan, diantaranya:

a) *Planning* (Perencanaan)

George R. Terry dalam bukunya *Principles of Management* (Sukarna, 2011:10) mengemukakan bahwa *Planning is the selecting and relating of facts and the making and using of assumptions regarding the future in the visualization and formulation to proposed of proposed activation believed necessary to achieve desired result* (Perencanaan adalah memilih fakta dan fakta terkait serta membuat dan menggunakan perkiraan atau asumsi untuk masa depan dengan menjelaskan dan merumuskan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan). Dalam perencanaan, tujuan, anggaran, standar, metode kerja, prosedur, dan program ditentukan (Sukarna, 2011:82-83).

b) *Organizing* (Pengorganisasian)

Pengorganisasian tidak dapat diwujudkan bila tidak ada hubungan dengan orang lain dan tidak terdapat menetapkan tugas-tugas dalam masing-masing unit. Menurut George R. Terry dalam bukunya *Principles of Management* (Sukarna, 2011:38) mengemukakan bahwa *Organizing is the determining, grouping and arranging of the various activities needed necessary for the attainment of the objectives, the assigning of the people to these activities, the providing of suitable physical factors of environment and the indicating of the relative authority delegated to each respective activity* (Pengorganisasian adalah penentuan, pengelompokan dan pengaturan jenis kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan, penempatan orang (karyawan), untuk kegiatan tersebut, penyediaan faktor fisik

yang sesuai untuk tujuan pekerjaan dan penunjukan hubungan kewenangan, yaitu didelegasikan kepada semua orang terkait dengan pelaksanaan setiap aktivitas yang diharapkan).

c) *Actuating* (Pelaksanaan atau Penggerakan)

Menurut George R. Terry dalam bukunya *Principles of Management* (Sukarna, 2011:82) mengatakan bahwa *Actuating is setting all members of the group to want to achieve and to strike to achieve the objective willingly and keeping with the managerial planning and organizing efforts* (Penggerakan adalah memberikan atau menyemangati semua anggota kelompok agar mau dan berusaha keras mencapai tujuan secara ikhlas dan selaras dengan perencanaan dan upaya pengorganisasian pimpinan).

d) *Controlling* (Pengawasan)

Menurut George R. Terry (Sukarna, 2011:110) mengemukakan bahwa *Controlling can be defined as the process of determining what is to accomplished, that is the standard, what is being accomplished. That is the performance, evaluating the performance, and if the necessary applying corrective measure so that performance takes place according to plans, that is conformity with the standard* (Pengawasan dapat dirumuskan sebagai proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang dilakukan yaitu pelaksanaan, penilaian pelaksanaan, dan bila perlu dilakukan perbaikan sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu sesuai dengan standar (ukuran)).

Pengawasan mempunyai peran atau kedudukan yang sangat penting dalam manajemen, mengingat pengawasan mempunyai fungsi untuk menguji apakah pelaksanaan pekerjaan tertib, terarah atau tidak. Dengan demikian pengendalian mempunyai fungsi untuk mengawasi semua kegiatan yang diarahkan pada sasaran,

sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai.

7. Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)

Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Bab I Pasal 1 Ayat (1) menjelaskan bahwa Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) adalah bantuan pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendorong dan untuk meningkatkan keswadayaan sehingga masyarakat bisa meningkatkan kualitas rumah dan pembangunan rumah baru beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum.

Untuk mencapai tujuan yakni meningkatkan harkat dan martabat kehidupan warga negara dan keluarganya, maka negara harus menjalankan tugas dan dengan mendukung pemilikan rumah yakni mendatangkan sarana dan prasarana yang mendukung ketertiban, keamanan, dan kenyamanan, tidak hanya itu saja perlu adanya keamanan dalam penguasaan dan penggunaan tanah dan rumah sehingga masyarakat merasa terjamin kepastian hukumnya atas kepemilikan dan pemanfaatan rumah tersebut.

Hal tersebut dengan tegas diatur dalam Penjelasan Umum UU Nomor 1 Tahun 2011, yang menjelaskan bahwa negara bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat bisa bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan lingkungan yang sehat dan aman. Sebagai salah satu kebutuhan yang sangat penting, rumah harus dimiliki oleh setiap keluarga, terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah dan bagi masyarakat yang tinggal di daerah padat penduduk di perkotaan. Pemerintah juga bertanggung jawab dalam menyediakan dan memberikan kemudahan untuk perolehan rumah tersebut bagi masyarakat melalui keswadayaan masyarakat yang dimiliki.

Aida Fitriani (2020:23) mengungkapkan bahwa Program Bantuan

Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) merupakan salah satu fasilitas pemerintah untuk membantu pelaksanaan pembangunan rumah atau perumahan yang layak dalam lingkungan yang sehat dan aman secara swadaya. Pelaksanaan program BSPS ini sangat membutuhkan keterlibatan masyarakat sehingga mampu mencapai tujuan utamanya yaitu menyediakan rumah yang layak huni. BSPS ini juga dikenal dengan sebutan bedah rumah yang merupakan salah satu program Direktorat perumahan Swadaya Direktorat Jenderal Penyediaan perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Aida juga menjelaskan tujuan dari program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) adalah untuk terbangunnya rumah layak huni oleh Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Program ini diharap mampu membantu masyarakat miskin dan MBR untuk membangun maupun merehabilitasi tempat tinggal mereka sehingga lebih layak huni.

8. Syarat Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)

Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Bab IV Pasal 11 ayat (1) menjelaskan bahwa syarat bagi penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yaitu sebagai berikut:

- a) Warga Negara Indonesia yang sudah berkeluarga.
- b) Memiliki atau menguasai tanah dengan alas hak yang sah.
- c) Belum memiliki rumah atau memiliki dan menempati satu-satunya rumah dengan kondisi tidak layak huni.
- d) Belum pernah memperoleh BSPS atau bantuan pemerintah untuk program perumahan.
- e) Berpenghasilan paling banyak sebesar upah minimum daerah provinsi.
- f) Bersedia berswadaya dan membentuk KBP dengan pernyataan tanggung renteng.

C. METODE

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Sugiyono (2016:9) mengemukakan bahwa metode penelitian kualitatif adalah metode yang digunakan untuk meneliti kondisi suatu objek alam dimana peneliti adalah instrumen kuncinya. Sedangkan menurut Saryono (2010:1) menjelaskan pendekatan penelitian kualitatif adalah proses penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan dan menjelaskan kualitas atau ciri-ciri pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau dideskripsikan melalui pendekatan ini.

Pendapat lain yang juga dikemukakan oleh Sugiyono (2013:1) menyatakan bahwa metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat post positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Berdasarkan argumen tersebut diatas maka metode penelitian yang digunakan yakni pendekatan kualitatif.

Dalam penelitian kualitatif ini, peneliti mengamati orang-orang di lingkungannya, berinteraksi dengan mereka, kemudian mencoba memahami bahasa dan interpretasi mereka tentang dunia di sekitar mereka, dan mendekati atau berinteraksi dengan orang-orang yang terkait dengan fokus penelitian dengan tujuan untuk mengeksplorasi pandangan mereka dan pengalaman untuk informasi atau data yang diperlukan.

2. Fokus Penelitian

Fokus penelitian dalam penelitian kualitatif adalah fokus kajian penelitian atau pokok soal yang diteliti, mengandung penjelasan mengenai dimensi-dimensi apa yang menjadi pusat perhatian dan hal yang kelak dibahas secara mendalam dan tuntas (Frisilia, 2016:40). Pada penelitian ini yang dikaji oleh peneliti yaitu fokus terhadap

pengelolaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Teori Pengelolaan atau Manajemen menurut George R. Terry, yang berfokus pada 4 Prinsip Manajemen, yaitu *planning* (perencanaan), *organizing* (pengorganisasian), *actuating* (penggerakan), dan *controlling* (pengendalian).

Sesuai dengan indikator diatas maka peneliti melampirkan beberapa pertanyaan terkait indikator yang nantinya digunakan pada saat meneliti di lapangan dengan menggunakan Teori Pengelolaan atau Manajemen menurut George R. Terry.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat peneliti memperoleh informasi tentang data yang dibutuhkan. Lokasi penelitian disini merupakan tempat penelitian akan dilakukan. Pemilihan lokasi harus didasarkan pada pertimbangan daya tarik, keunikan dan kesesuaian dengan topik yang dipilih. (Suwarma Al Muchtar, 2015: 243). Maka dalam penelitian ini yang menjadi lokasi penelitian adalah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur yang bertempat di Jalan Batuata, Kelurahan Waihali Kabupaten Flores Timur.

Adapun alasan dari peneliti dalam memilih lokasi ini Sebagai tempat penelitian karena program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) ini sedang aktif dijalankan oleh pemerintah daerah Kabupaten Flores Timur dan yang mengelola Program ini adalah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur. Salah satu yang menjadi lokasi penyaluran program ini ialah di Desa Sagu.

D. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

1. Pengelolaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Kabupaten Flores Timur di Desa Sagu, Kecamatan Adonara

Permasalahan rumah tidak layak huni yang ada di Desa Sagu, Kecamatan Adonara mengharuskan pemerintah untuk memperbaiki kualitas rumah salah satunya melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang dikelola oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur. Agar program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Tersebut berjalan dengan baik dan mencapai tujuan, sebagaimana konsep pengelolaan menurut George R. Terry (dalam Sukarna, 2011:3), mengatakan bahwa pengelolaan adalah pencapaian tujuan-tujuan yang ditetapkan melalui atau bersama-sama usaha orang lain.

Peneliti menggunakan teori George R. Terry dalam (Sukarna, 2011:10) yang menjelaskan bahwa dalam pengelolaan terdapat proses yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan yaitu perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), penggerakan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*). Maka berdasarkan hasil penelitian pengelolaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) diuraikan sebagai berikut:

a) Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan adalah memilih fakta dan fakta terkait serta membuat dan menggunakan perkiraan atau asumsi untuk masa depan dengan menjelaskan dan merumuskan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Dalam perencanaan, tujuan, anggaran, standar, metode kerja, prosedur dan program ditentukan (Sukarna, 2011: 82-83).

Perencanaan yang baik dapat dicapai jika memperhatikan keadaan sekarang, memperhatikan keberhasilan dan kegagalan, memperhatikan potensi, tantangan dan kendala, mengubah

kelemahan menjadi kekuatan dan ancaman menjadi peluang, mengikutsertakan pihak-pihak terkait dan memperhatikan komitmen dan mengkoordinasikan pihak-pihak terkait.

Berdasarkan data hasil penelitian, sudah ditentukan tujuan dari program ini yakni terbangunnya rumah layak huni oleh Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Anggaran untuk Program BSPS pada Desa Sagu ini ditetapkan oleh Kabupaten sebesar Rp.17.500.000. Untuk standar metode kerja, prosedur, dan jenis kegiatan sudah ditetapkan dalam pedoman Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Kabupaten Flores Timur.

Perencanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya ini juga sudah memenuhi beberapa kriteria seperti memperhatikan keadaan dilapangan yakni dengan turun melihat kondisi Rumah Tidak Layak Huni di Desa Sagu. Kemudian memperhatikan potensi, tantangan dan kendala yang ada yakni melihat kecukupan Swadaya yang dimiliki serta dukungan dari masyarakat. Kemudian menentukan strategi. Kemudian memperhatikan kelemahan yang ada menjadi kekuatan dan ancaman menjadi peluang. Dan mengikutsertakan pihak-pihak terkait yakni kepala desa dan mengkoordinasikan pihak-pihak terkait tersebut dilihat dari Kadis mendapat data terkait masyarakat yang miskin dan memiliki rumah tidak layak huni dari pemerintah Desa Sagu.

Namun dalam perencanaan tersebut ada pula kriteria perencanaan yang belum dilaksanakan oleh pengelola dalam merencanakan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yaitu memperhatikan Kegagalan. Hal tersebut dilakukan karena manajer lebih fokus pada pencapaian kesuksesan, sehingga manajer mengalami keterbatasan dalam menganalisis sejauh mana kegagalan tersebut bisa terjadi. Perencanaan yang

ada mampu melaksanakan program tersebut, namun akan lebih optimal jika memenuhi semua kriteria perencanaan yang baik.

b) Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian adalah penentuan, pengelompokan dan pengaturan jenis kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan, penempatan orang (karyawan), untuk kegiatan tersebut, penyediaan faktor fisik yang sesuai untuk tujuan pekerjaan dan penunjukan hubungan kewenangan, yaitu didelegasikan kepada semua orang terkait dengan pelaksanaan setiap aktivitas yang diharapkan. (Sukarna, 2011:38)

Suatu pengorganisasian yang baik memenuhi kegiatan yaitu pembagian kerja dimana menetapkan dengan teliti dan menentukan pekerjaan yang akan dilaksanakan, menetapkan wewenang dan tanggung jawab dimana membagi pekerjaan menjadi tugas-tugas setiap orang, dan pelimpahan wewenang yaitu membuat tugas-tugas menjadi posisi-posisi dan menentukan syarat-syarat sesuai posisi atau tujuan.

Berdasarkan data hasil penelitian, pengorganisasian Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya ini sudah memenuhi kriteria yang ada seperti menetapkan dengan teliti dan menentukan pekerjaan yang akan dilaksanakan yakni membentuk Tim Teknis dan menentukan pekerjaan yang akan dilaksanakan yaitu kegiatan sosialisasi terkait Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, verifikasi calon penerima, kesepakatan calon penerima, membentuk kelompok penerima, menentukan toko atau penyedia bahan bangunan dan identifikasi kebutuhan proposal.

Dalam Tim Teknis Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya ini terdiri dari pengarah, penanggung jawab, ketua, wakil, sekretaris, dan anggota-anggota. Dilakukan pula pembagian pekerjaan

menjadi tugas-tugas yakni adanya koordinator fasilitator dan tenaga fasilitator lapangan yang bertugas untuk mendampingi penerima untuk membentuk kelompok penerima bantuan dan kemudian membuat tugas-tugas menjadi posisi-posisi dimana posisi tersebut dipimpin dan berhubungan baik dan bertanggung jawab serta selalu berkoordinasi selama proses pengorganisasian. Kemudian ada pula menentukan syarat-syarat sesuai posisi yakni ketentuan posisi-posisi dalam pengorganisasian ini ada dalam ruang lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Pertanahan sehingga koordinasinya lebih mudah.

Peneliti menyimpulkan bahwa pembagian tugas dan pemberian wewenang dalam pengelolaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya ini berjalan dengan baik yakni dengan ditemukan adanya Surat Keputusan tentang pembentukan Tim Teknis Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dan Surat Penetapan Tenaga Fasilitator Lapangan. Hal itu menunjukkan bahwa pengorganisasian telah berjalan dengan baik.

c) Pergerakan (*Actuating*)

Pergerakan atau pelaksanaan ini adalah kegiatan yang dilakukan oleh manajer untuk mengawali dan melanjutkan kegiatan yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaan ini ada beberapa hal yang perlu dipenuhi yaitu adanya pemberian perintah dari atasan kebawahan, memperhatikan unsur perintah dan jenis perintah yang diberikan (lisan dan tertulis).

Dalam pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya ini ada kegiatan sudah direncanakan yakni melakukan sosialisasi terkait Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, melakukan verifikasi calon penerima, kesepakatan calon penerima, membentuk kelompok penerima,

menentukan toko atau penyedia bahan bangunan dan identifikasi kebutuhan proposal sudah terlaksanakan.

Pergerakan atau pelaksanaan ini sudah berjalan optimal karena sudah memenuhi indikator pergerakan dan pelaksanaan yakni dalam Pengelolaan sudah melaksanakan pemberian perintah dari atasan kebawah dengan memperhatikan unsur dan jenis perintah sehingga kegiatan yang telah direncanakan berjalan dengan optimal.

d) **Pengawasan (*Controlling*)**

Pengawasan dapat dirumuskan sebagai proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang dilakukan yaitu pelaksanaan, penilaian pelaksanaan, dan bila perlu dilakukan perbaikan sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu sesuai dengan standar atau ukuran (Sukarna, 2011:82). Dalam pengawasan ada beberapa hal yang diperhatikan yaitu menetapkan ukuran-ukuran, memonitor hasil-hasil, membandingkan hasil dengan ukuran-ukuran serta memperbaiki penyimpangan-penyimpangan.

Berdasarkan data hasil penelitian bahwa pengawasan yang dilakukan secara bertahap. Ada pula pengawasan yang dilakukan oleh tenaga fasilitator lapangan selaku pendamping masyarakat yakni seminggu sekali untuk memonitor keadaan yang terjadi di lapangan. Dalam hal ini tenaga fasilitator lapangan telah menetapkan ukuran-ukuran sehingga menetapkan standar keberhasilan sebagai pembanding hasil kemudian memperbaiki penyimpangan-penyimpangan yang ada sehingga dapat mencapai tujuan yang diharapkan.

Peneliti menyimpulkan bahwa pengawasan dalam pengelolaan Program Bantuan Stimulan ini sudah terlaksana dengan baik karena adanya penetapan ukuran-ukuran sebagai pembanding hasil untuk mengetahui adanya penyimpangan. Kemudian dilakukan perbaikan atas

penyimpangan sehingga pembangunan sesuai dengan yang ditetapkan.

2. Faktor Pendukung dalam Pengelolaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Kabupaten Flores Timur di Desa Sagu, Kecamatan Adonara

Berdasarkan data hasil penelitian bahwa yang menjadi faktor pendukung dalam pengelolaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Kabupaten Flores Timur pada Desa Sagu Kecamatan Adonara adalah partisipasi pemerintah desa dan masyarakat Desa Sagu.

3. Faktor Penghambat dalam Pengelolaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Kabupaten Flores Timur di Desa Sagu, Kecamatan Adonara

Berdasarkan data hasil penelitian bahwa yang menjadi faktor penghambat dalam pengelolaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Kabupaten Flores Timur pada Desa Sagu Kecamatan Adonara adalah:

a) **Keterlambatan Pendropingan Bahan**

Bahan merupakan faktor yang sangat penting dalam pembangunan. Keterlambatan pendropingan bahan oleh suplayer menjadi faktor penghambat. Keterlambatan ini biasanya disebabkan oleh cuaca yang tidak mendukung.

b) **Kurangnya Tenaga Kerja**

Dalam program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya ini memang diterapkan sistem gotong royong. Jadi pembangunan rumah ini dilakukan secara bergantian. Namun di zaman ini semangat gotong royong sudah mulai hilang, dan untuk mencari tenaga upah pun agak susah. Jika salah satu masyarakat atau keluarga yang meninggal dunia maka proses pembangunannya dihentikan dulu. Faktor cuaca juga mempengaruhi proses pembangunan.

E. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil analisis yang telah dilakukan peneliti, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- a) Pengelolaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur pada Desa Sagu Kecamatan Adonara masih dalam proses tahap terakhir yakni pengatapan karena kendala faktor cuaca, pendopongan bahan, tetapi masyarakat Desa Sagu tetap dijalankan melalui perencanaan dimana dilakukan penetapan tujuan, anggaran, standar metode kerja, prosedur, dan program. Kemudian pihak pengelola turun melihat kondisi dilapangan untuk memperhatikan potensi, tantangan dan kendala yang ada. Pengorganisasian dilaksanakan dengan membentuk Tim Teknis Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dan dilakukan penetapan koordinator fasilitator serta tenaga fasilitator lapangan dan menetapkan pekerjaan yang akan dilaksanakan yakni melakukan sosialisasi, melakukan verifikasi calon penerima, kesepakatan calon penerima, membentuk kelompok penerima, menentukan toko atau penyedia bahan bangunan dan identifikasi kebutuhan proposal. Dalam pergerakan atau pelaksanaan, penanggung jawab program menggerakkan tim teknis serta tenaga fasilitator lapangan untuk melakukan kegiatan yang direncanakan yaitu melakukan sosialisasi, melakukan verifikasi calon penerima, kesepakatan calon penerima, membentuk kelompok penerima, menentukan toko atau penyedia bahan bangunan, dan identifikasi kebutuhan proposal. Serta dilakukan pengawasan oleh Tim Teknis secara bertahap sedangkan tenaga fasilitator lapangan selaku pendamping kelompok penerima bantuan melakukan pengawasan seminggu sekali untuk

memonitoring pembangunan dan memperbaiki penyimpangan yang terjadi di lapangan.

- b) Faktor pendukung dalam pengelolaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Kabupaten Flores Timur pada Desa Sagu Kecamatan Adonara adalah partisipasi pemerintah desa dan masyarakat Desa Sagu.
- c) Faktor penghambat dalam pengelolaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yaitu keterlambatan pendropingan bahan oleh supplier dan kurangnya tenaga kerja serta cuaca yang kurang mendukung. Namun jika salah satu anggota keluarga atau masyarakat yang meninggal maka proses pembangunannya dihentikan sementara.

2. Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian tentang “Analisis Pengelolaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Flores Timur (Studi Pada Desa Sagu, Kecamatan Adonara)”, maka peneliti memberikan saran yaitu:

- a) Dalam perencanaan, sebaiknya pihak pengelola program bantuan stimulan perumahan swadaya di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan memperhatikan potensi kegagalan sehingga perlu disiapkan solusi bilamana kegagalan itu terjadi.
- b) Dalam melakukan pendampingan terhadap kelompok penerima bantuan, pihak pengelola Program Bantuan Stimulan Perumahan di Dinas Perumahan, kawasan Permukiman dan Pertanahan memperhatikan kriteria dari toko/penyedia bahan sehingga tidak terjadi keterlambatan pendropingan dan memperhatikan tenaga kerjanya. Solusi dari kurangnya tenaga kerja yaitu dengan melakukan gotong royong dan semangat masyarakat dalam mensukseskan program tersebut.

REFERENSI

- Amirul, M., Sri, R., & Damajanti, S. L. (2020). *Administrasi Pelayanan Kesehatan Masyarakat*. Surabaya: CV. Jakas Media Publishing.
- Agustino, L. (2008). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Budi, W. (2004). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Lestari, W. F. (2015). Analisis Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru. *Biomass Chem Eng*, 4(9), 1–15.
- Londa, V. Y. (2021). Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Dalam Penyediaan Rumah Layak Huni di Desa Tolok Satu Kecamatan Tompaso Kabupaten Minahasa. *Jurnal Administrasi Publik Unsrat*, 7(10), 35–45.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Swadaya.
- Rahman, A. (2018). Identifikasi Strategi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal Manajemen Pembangunan*, 5(1), 17–36.
- Riant, N. (2015). *Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sukarna. (2010). *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Solichin, A. W. (2016). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik: dari Formulasi ke Penyusunan Model-model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Tangkilin, & Hisan, H. N. (2003). *Evaluasi Kebijakan Publik: Penjelasan, Analisis dan Transformasi*. Yogyakarta: Balairung.
- Tefa, G. (2016). Penerapan Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Pelayanan Pembuatan Kartu Keluarga (Studi Kasus Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur). *Jurnal Politikolog*, 3(1), 67–79.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- Winarno, B. (2007). *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo (Anggota IKAPI).
- William, N. D. (2000). *Pengantar Analisis Kebijakan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

